KAJIAN YURIDIS PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN (Studi Kasus Penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 660.1/ 6 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen
PT Semen Indonesia (PERSERO) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah)
FAISOL RAHMAN, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M. Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

BAB I PENGANTAR 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Keaslian Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Perizinan 15

1. Izin 15
2. Izin Lingkungan 25

B. Sistem Pengawasan 45

BAB III METODE PENELITIAN 56

1. Sifat Penelitian 56
2. Jenis Penelitian 56
3. Analisis Data 57
4. Jalannya Penelitian 63
5. Kendala Penelitian 64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 65

A. Pertimbangan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Nomor 660.1/ 6 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah 65

1. Pertimbangan Yuridis 66
2. Pertimbangan Ekonomi 81
3. Pertimbangan Lingkungan 88

B. Keabsahan Hukum Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Nomor 660.1/ 6 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

KAJIAN YURIDIS PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN (Studi Kasus Penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 660.1/ 6 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen
PT Semen Indonesia (PERSERO) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah)
FAISOL RAHMAN, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M. Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah 94
1. Keabsahan Hukum Formil 95
2. Keabsahan Hukum Materiil 103
   a. Organ pemerintah yang membuat keputusan harus berwenang 103
   b. Keputusan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis 105
   c. Keputusan harus berdasarkan situasi tertentu..... 119
   d. Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya 132

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 163
A. Kesimpulan..... 163
B. Saran..... 166
Daftar Pustaka